



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEBELUM MASA TUGASNYA BERAKHIR **Cornelis Pengin Semua Kabupaten/ Kota Dapat WTP**

PONTIANAK-RK. Anugerah wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan seolah-olah menjadi obsesi bagi kepala daerah. Meskipun penilaian itu tak menjamin orang-orang dalam pemerintahan tak korupsi, setidaknya di atas kertas laporan keuangannya sudah oke.

► Halaman 7

BINCANG-BINCANG.

Gubernur Cornelis (kanan) ngobrol dengan Anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar (kiri), usai ramah tamah dan makan malam di rumah dinasnya, Pontianak, Selasa malam (13/12). HUMAS PEMPROV KALBAR FOR RAKYAT KALBAR





Cornelis Pengin Semua Kabupaten/Kota Dapat WTP

"Saya berharap, untuk tahun depan, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat memperoleh WTP atas laporan keuangannya," tutur Gubernur Cornelis, saat beramah tamah dan makan malam dengan Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar, di pendopo rumah dinasnya, Selasa (13/12).

Ia menjelaskan, sekarang sudah empat kabupaten dan satu kota mendapatkan WTP selain Pemprov Kalbar. "Sehingga mencerminkan pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah Kalbar sudah berjalan baik," terangnya.

Cornelis yakin dapat mencapai hal itu. Dengan catatan, para kepala daerah berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di 14 kabupaten/kota. Selain profesionalitas pegawai, kerja sama dengan BPK RI dan Pemprov Kalbar bisa membuka lebar kesempatan Pemkab/Pemkot memperoleh WTP.

"Mudah-mudahan sebelum peri-

Mantan Bupati Landak dua periode ini membeberkan, kendala utama daerah yang belum mendapatkan WTP karena masih berkutat dengan masalah aset. Terutama di daerah-daerah pemekaran.

"Harus dicari jalan keluar terbaiknya," ujar Cornelis.

Keinginan gubernur itu diamini Anggota VI BPK RI, Bahrullah Akbar. "Kita sambut harapan dari gubernur ini, agar tahun ini atau tahun depan, semua kabupaten/kota di Kalbar bisa WTP. Itu bukan karena BPK, tapi karena kinerja ibu bapak sekalian," ujarnya kepada para bupati dan wali kota yang hadir.

Lanjut dia, kalau sudah wajar dengan pengecualian (WDP) sekitar tahun, tapi sampai sekarang belum WTP, agar berusaha lebih keras lagi. "BPK membuka ruang untuk diskusi," tutur Bahrullah.

Mantan Auditor BPK ini membe-

berkan kunci agar WTP bisa didapat

para Pemkot/Pemkab. Penilaian

BPK meliputi empat unsur,

yakni kesesuaian dengan standar akun-

tansi pemerintah (SAP), kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap

peraturan per-UU, dan efektivitas

sistem pengendalian intern (SPI).

"Supaya dalam penyebarluasan atau pengukuran, atau mengalokasikan dana-danakepadamasyarakatsemakin adil. Karena BPK nantinya akan mengaudit kinerja, menilai kinerja berdasarkan keadilan anggaran," ungkapnya.

Seperi diketahui, ada lima opini BPK. WTP merupakan opini atas audit Laporan Keuangan (LK) yang diberikan jika informasi keuangan itu bebas dari kesalahan penyajian material.

"Kalau ada LK dikasih opini ini, maka auditor yakin menurut buku yang dikumpulkan. Audit telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang benaku umum dengan baik. Jika memang ada kesalahan, sifatnya tidak material dan tidak punya pengaruh signifikan pada pengambilan keputusan," papar Bahrullah.

Imbauh dia, "Opini ini terhadap LK. Jadi jangan heran kalau banyak instansi WTP, tapi koruptornya tetap banyak."

Kemudian, ada opini yang namanya Wajar Tampak Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). "Ini hampir WTP. Auditor perlu menambahkan suatu paragraf dalam laporan audit, meskipun hal

itu tidak mempengaruhi pendapat WTP," terangnya.

Berikutnya, Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini ada jika sebagian besar informasi dalam LK bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

"Sebagian akun akan memberi nama little adverse (ketidakwajaran kecil) untuk menunjukkan ketidakwajaran pada item tertentu. Tapi secara keseluruhan tetap wajar," jelas Bahrullah.

Sedangkan opini Tidak Wajar (TW)

muncul jika LK salah saji material atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Kalau sampai begini, LK jelas diragukan kebenarannya dan kemudian pengambilan keputusannnya juga salah.

"Yang terakhir Tidak Memberikan Pendapat (TNP) alias Disclaimer.

Auditor dalam posisi tidak memberi-

kan pendapat apapun atas sebuah

LK karena dia tidak yakin terhadap

apa yang diperiksa, semisal memang

tidak diberikan bukti walau sudah

dimpinta," tukasnya.

*Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbal*